

**ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH SEBELUM DAN
SESUDAH DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH**

Suatu Kajian Empiris Di Propinsi Jawa Barat

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Nama : Tatas Firmansyah
No. Mahasiswa : 01 312 401
Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

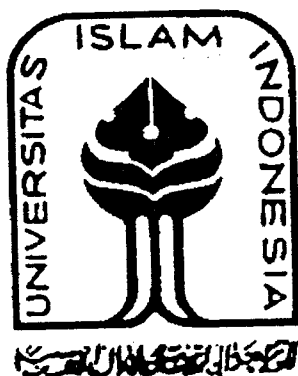
2006

ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH SEBELUM DAN
SESUDAH DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH

Suatu Kajian Empiris Di Propinsi Jawa Barat

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna
memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia



oleh

Nama : Tatas Firmansyah
No. Mahasiswa : 01 312 401
Jurusan : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH
OTONOMI DAERAH, SUATU KAJIAN EMPIRIS DI PROPINSI JAWA BARAT

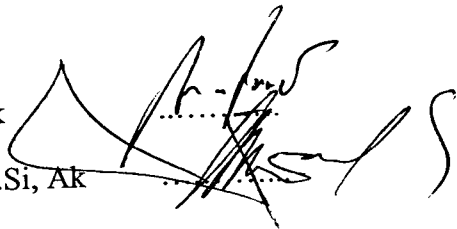
Disusun Oleh: TATAS FIRMANSYAH
Nomor mahasiswa: 01312401

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 14 Maret 2006

Pembimbing Skripsi/Penguji : Mahmud, SE, M.Si, Ak

Penguji

: Drs. Syamsul Hadi, M.Si, Ak



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Drs. Suwarsono, MA



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 22 Februari 2006
Penulis,

Tatas Firmansyah

ABSTRAKSI

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kemandirian daerah periode sebelum dan sesudah otonomi daerah. Variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian adalah tingkat kemampuan pembiayaan diukur dengan rasio antara Penerimaan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengeluaran Rutin (PR), tingkat ketergantungan diukur dengan rasio antara Bantuan/subsidi terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), dan tingkat desentralisasi fiskal diukur dengan rasio antara PAD terhadap TPD.

Data yang digunakan adalah data tiga tahun periode sebelum otonomi daerah yaitu tahun 1998, 1999, 2000 dan tiga tahun setelah otonomi daerah yaitu tahun 2001, 2002, 2003. Alat analisis yang digunakan adalah uji Paired Sample t Test.

Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan variabel tingkat kemandirian daerah berupa tingkat kemampuan pembiayaan dan tingkat ketergantungan. Nilai rata-rata variabel tersebut menunjukkan periode sebelum otonomi daerah tinggi secara signifikan dibandingkan sesudah otonomi daerah. Sedangkan tingkat ketergantungan daerah menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah. Nilai rata-rata tingkat ketergantungan sebelum maupun sesudah otonomi daerah menunjukkan nilai yang sangat tinggi, ini menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak membawa dampak terhadap tingkat ketergantungan daerah, artinya bantuan/subsidi dari pemerintah pusat masih nyata.

Kata kunci : Kemandirian daerah

Motto

Demi Allah, andaikan Allah memberi petunjuk kepada seseorang melaluiimu, maka sesungguhnya hal itu lebih baik bagimu daripada onta yang merah – merah (bagus).
(HR. Bukhari dan Muslim)

Seorang hamba memiliki suatu derajat di surga.
Ketika dia tidak dapat mencapainya
dengan amal-amal kebaikannya,
maka Allah menguji dan mencobanya
agar ia mencapai derajat itu.
(HR. Athabrani)

Hidup bukanlah kulit luarnya, tapi yang tersembunyi.
Dan juga bukanlah yang tampak pada kulitnya, tapi isinya.
Manusia bukanlah wajah mereka, tapi hati mereka.
(Kahlil Gibran)

Halaman Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Bpk Dumiri dan Ibu Yati atas segala kesabaran dan kecintaan dalam membesarkan kami anak-anaknya, yang telah melalui pahit getirnya hidup demi kami anak-anaknya.
- ❖ Saudara-saudaraku yang aku sayangi dan cintai, Kak Aris, Kak Ade, Alm Kak Elin, Vanti, Adikku tersayang Romi.
- ❖ Pendamping hidupku nanti.....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kemandirian Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah. Suatu Kajian Empiris Di Propinsi Jawa Barat” dengan baik.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Strara 1 (S1) dalam ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan masukan, saran, bantuan dan bimbingan serta dukungan moril yang berarti dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Suwarsono Muhammad, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Mahmudi, SE, M.Si. Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan, serta bantuan yang tak terhingga dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu sebagai bekal yang tidak ternilai bagi masa depan penulis.
4. Bapak, Ibu, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril, materil, nasehat, serta sabar dalam membimbingku, sejak aku terlahir sampai sekarang ini.
5. Seluruh saudara-saudaraku, Kak Aris, Kak Ade, Vanti, Romi yang selalu ada saat aku susah dan senang, serta seluruh keluargaku yang selalu mendoakan dan memberikanku nasehat dan masukan yang bermanfaat untuk kebaikan penulis.
6. Sahabat-sahabatku yang ada di Jatibarang: Narto, Pakel, Kenda, Shita, Tati, Aisyah, Susi, Laily, Ipin, Etin. Terima kasih atas dukungannya
7. Teman – teman kost Pondok Retak, Bonang, Ricky, Jagat, Teguh, Eko, Alpha, Tukul, Iskandar, Upank, Juned, Mbah man, Iswan, Toyib dan Thole. Keep fighting.....
8. Teman seperjuanganku: Jati, Diajeng, Very “Maju terus pantang mundur.....”
9. Teman-teman kelompok KKN SL 05: Arief, Danang, Anung, Bayu, Hary, Maya, Puput, Fiti, Diana.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang juga telah membantu penulis tanpa pamrih, maturnuwun nggih...

Akhirnya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan atas banyak bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Februari 2006

Tatas Firmansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Judul Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Berita Acara Ujian Skripsi	iv
Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	v
Abstraksi.....	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	11

BAB II		TINJAUAN PUSTAKA	
2.1	Landasan Teori		
2.1.1	Otonomi Daerah.....	12	
2.1.2	Kemandirian daerah.....	13	
2.1.3	Penerimaan Asli Daerah.....	14	
2.1.4	Tingkat Kemampuan Pembiayaan.....	14	
2.1.5	Tingkat Ketergantungan.....	15	
2.1.6	Desentralisasi Fiskal.....	17	
2.1.7	Keuangan Daerah:		
	sebelum dan sesudah otonomi.....	18	
2.2	Pengembangan Hipotesis.....	20	
BAB III		METODE PENELITIAN	
3.1	Subyek Penelitian.....	24	
3.2	Tekhnik Pengambilan Sampel.....	24	
3.3	Jenis Data.....	25	
3.4	Tekhnik Pengumpulan Data.....	25	
3.5	Pengukuran Variabel.....	25	
3.6	Metode Analisis Data.....	26	
3.7	Pengujian Hipotesis.....	27	
BAB IV		ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1	Hasil Uji Normalitas Data.....	28	
4.2	Analisis Deskripsi Data.....	29	
4.3	Analisis Data Rasio.....	33	

4.4	Analisis rasio PAD dan Bantuan terhadap Total Belanja Daerah.....	36
4.5	Analisis Hasil Uji Statistik.....	37
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	41
5.2	Implikasi Penelitian.....	43
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	44
5.4	Saran Penelitian Berikutnya.....	45
	DAFTAR PUSTAKA.....	46
	LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.....	28
Tabel 4.2	Analisis Data Tahun 1998-2003.....	30
Tabel 4.3	Analisis Data Rasio 1998-2003.....	33
Tabel 4.4	Analisis Rasio PAD Dan Bantuan Terhadap Total Belanja Daerah.....	36
Tabel 4.5	Uji Paired Sample t Test.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Data Realisasi APBD Tahun 1998-2003.....	49
Data Rasio Tahun 1998-2003.....	51
Analisis Rasio PAD Dan Bantuan Terhadap Total Belanja Daerah.....	52
Hasil Uji Normalitas Data.....	53
Hasil Uji Paired Sample t Test.....	56

**ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH SEBELUM DAN
SESUDAH DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH**

Suatu Kajian Empiris Di Propinsi Jawa Barat

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna
memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia



oleh

Nama : Tatas Firmansyah
No. Mahasiswa : 01 312 401
Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006**

**ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH SEBELUM DAN
SESUDAH DIBERLAKUKANYA OTONOMI DAERAH**

Suatu Kajian Empiris Di Propinsi Jawa Barat

HASIL PENELITIAN



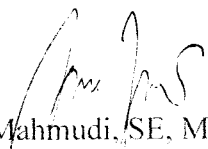
Diajukan oleh

Nama : Tatas Firmansyah
No. Mahasiswa : 01 312 401
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada Tanggal..... 10 Februari 2006

Dosen Pembimbing.


(Mahmudi, SE, M.Si, Ak)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Cita-cita otonomi daerah dinyatakan di negara Indonesia melalui konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan konstitusi tersebut beserta penjelasannya memberi gambaran adanya kaitan antara otonomi daerah dengan bentuk negara kesatuan, yaitu pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 UUD 1945.

Indonesia sebagai negara republik dan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan oleh pasal 18 UUD 1945 yang antara lain menyatakan, bahwa pembagian daerah Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Indonesia dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Dengan demikian UUD 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Pemerintah Orde Baru menetapkan realisasi otonomi daerah melalui Undang-Undang No 5 Tahun 1974 dengan konsep otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi di dalam salah satu bagian undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa otonomi lebih merupakan kewajiban dari pada hak, maka kontrol pemerintah pusat terhadap daerah menjadi sangat

Pemerintah Kabupaten/Kota: meningkatnya kemandirian dan kemampuan daerah dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerah; dan makin terkoordinasi pembangunan antarsektor dan antardaerah serta antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah (Sumodiningrat, 1997:1).

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran-serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu Undang-Undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota dengan prinsip bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat kemandirian Daerah Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah, Suatu Kajian Empiris di Propinsi Jawa Barat”**.

1.2 MASALAH PENELITIAN

Dari latar belakang yang telah diutarakan di atas maka masalah yang muncul adalah apakah antara periode sebelum dan setelah diberlakukannya otonomi daerah kemandirian daerah pemerintah kabupaten/kota terdapat perbedaan yang signifikan?

1.3 BATASAN MASALAH

1. Penelitian ini suatu kajian empiris di propinsi Jawa Barat, artinya sampel tidak berasal dari seluruh propinsi di Indonesia sebagai suatu populasinya, sehingga simpulan yang diambil mungkin hanya berlaku pada propinsi Jawa Barat.
2. Tolok ukur atau variabel tingkat kemampuan pembiayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dan tingkat desentralisasi fiskal yang digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu di antaranya dari beberapa tolok ukur yang ada.
3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tiga tahun sebelum otonomi daerah yaitu tahun anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2000 dan tiga tahun sesudah otonomi daerah yaitu tahun anggaran 2001, 2002, 2003.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apakah tingkat kemampuan pembiayaan daerah pemerintah kabupaten/kota antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat perbedaan yang signifikan.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat perbedaan yang signifikan.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat perbedaan yang signifikan.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan baik bagi mahasiswa dalam menerapkan dan mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kuliah dan menambah pengetahuan mahasiswa mengenai Akuntansi Sektor Publik.

- Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah Pemerintah Daerah di era otonomi daerah.

- Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pustaka tentang Akuntansi Sektor Publik khususnya mengenai Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1.6 METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah pemerintah kabupaten/kota yang sudah ada pada periode pengamatan di propinsi Jawa Barat.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari situs internet *www.depkeu.go.id*. Data tersebut merupakan data realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh propinsi Jawa Barat. Periode APBD yang menjadi pengamatan penelitian ini adalah periode anggaran tiga tahun sebelum otonomi daerah yaitu tahun anggaran 1998/1999, 1999/2000, dan 2000 dan Periode anggaran setelah otonomi daerah yaitu tahun anggaran 2001, 2002, 2003. Karena otonomi daerah diberlakukan pada 1 Januari 2001 maka tahun anggaran 2000 merupakan periode satu tahun anggaran.

3. Variabel Penelitian

Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan kemandirian daerah pemerintah kabupaten/kota tersusun sebagai berikut:

- Tingkat Kemampuan Pembiayaan

Kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran rutin pada penelitian ini diukur dengan analisis rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah pengeluaran rutin (PR) (Halim, 2001).

- Tingkat Ketergantungan

Bagian ini akan mengukur tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan/subsidi dari pemerintah pusat. Dalam penelitian ini diukur dengan analisis rasio antara bantuan/subsidi (B) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) (Kuncoro, 1995).

- Tingkat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal dalam penelitian ini diukur dengan analisis rasio antara PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) (Musgrave & Musgrave, 1991).

4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan variabel-variabel di atas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1:

H₀: Tingkat kemampuan pembiayaan pemerintah kabupaten/kota antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah tidak terdapat perbedaan yang signifikan

H₁: Tingkat kemampuan pembiayaan pemerintah kabupaten/kota antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat perbedaan yang signifikan.

Hipotesis 2:

H₀: Tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

H₂: Tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat perbedaan yang signifikan.

Hipotesis 3:

H₀: Tingkat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

H₃: Tingkat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat perbedaan yang signifikan.

5. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis-hipotesis diatas menggunakan pengujian statistik parametrik yaitu uji t untuk dua sampel berpasangan (Paired Sample t Test), uji t ini digunakan untuk menguji dua sample yang berpasangan yaitu sampel sebelum dan sesudah di berlakukanya otonomi daerah apakah mempunyai rata-rata tingkat kemampuan pembiayaan, tingkat ketergantungan dan tingkat desentralisasi fiskal daerah secara nyata atau signifikan berbeda atau tidak. Jika ternyata data tidak normal maka dalam penelitian ini akan digunakan pengujian non parametrik yaitu uji data dua sampel yang berhubungan (uji peringkat bertanda Wilcoxon).

6. Metode Analisis data

Data penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis normalitas. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui data penelitian berdistribusi normal

atau tidak dengan uji nonparametrik yaitu Kolmogorov-Smirnov. Analisis ini sebagai prasyarat dari uji beda untuk dua sampel yang berpasangan (Paired Sample t Test).

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam rangka penyusunan skripsi, penulis akan menyajikan sistematika penulisan mulai dari latar belakang hingga kesimpulan yang akan dijukan oleh penulis.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi: Mengenai penjabaran teori-teori yang melandasi penelitian ini dan beberapa tinjauan pustaka tentang penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi: Mengenai data umum dan data khusus yang digunakan dalam objek penelitian.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi: tentang hasil dari pengujian hipotesis dan pengujian asumsi klasik, serta pembahasan hasil yang diperoleh.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tiga hal, yaitu: kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Otonomi adalah penyerahan tanggung jawab antar berbagai tingkatan pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 (telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 (telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perubahan sistem pemerintahan dari yang sentralistik menjadi desentralistik menjadi tuntutan yang tidak terhindarkan.

Kedua UU tersebut menekankan bahwa pengembangan otonomi Daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan, pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Kedua UU tersebut, juga telah memberi kejelasan arah yang ingin dicapai dan memberi keleluasaan bagi daerah melebihi apa yang ada di masa sebelumnya.

Di dalam pembangunan ekonomi terutama pembangunan di daerah, peranan penting keuangan daerah adalah adanya pemantapan otonomi daerah. Otonomi daerah ditunjukkan dengan delegasi kewenangan pengambilan keputusan dan administrasi pembangunan serta delegasi pembiayaan

pembangunan daerah. Kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah yang bersangkutan di dalam memanfaatkan potensi alam dan ekonomi serta manajemen keuangan daerah (Sumodiningrat, 1997:1).

2.1.2 Kemandirian Daerah

Secara umum, kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, kemandirian daerah akan semakin berperan dan semakin penting. Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Sedangkan kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD.

Kemandirian daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran atau kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran rutinnya dan masih mampu membiayai pengeluaran pembangunan. Hal tersebut akan mencerminkan kemandirian daerah apabila penerimaan asli daerah (PAD) mampu membiayai pengeluaran rutin dan masih mampu membiayai pengeluaran pembangunannya. Untuk bantuan/subsidi dari pemerintah pusat seharusnya semakin berkurang, sehingga proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah/Tingkat Desentralisasi Fiskal semakin besar dibandingkan dengan proporsi ketergantungan daerah terhadap bantuan/subsidi dari pemerintah pusat.

2.1.3 Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002a), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang (Mamesah, 1995). Seiring dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.4 Tingkat Kemampuan Pembiayaan

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Halim, 2001).

Tingkat kemampuan pembiayaan daerah yaitu untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam membiayai pengeluaran rutin. Indikator tingkat kemampuan pembiayaan suatu daerah diukur dengan rasio PAD terhadap pengeluaran rutin (PR).

Belanja rutin atau pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun periode anggaran dan tidak dapat menambah aset atau

kekayaan bagi pemerintah, disebut rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang pada setiap tahun.

Pada dasarnya pengeluaran rutin merupakan perwujudan dari pemakaian dana-dana untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah, di samping kegiatan-kegiatan yang bersifat administrasi. Oleh karena itu belanja pegawai menunjukkan jumlah terbesar di antara semua jenis pengeluaran rutin.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa untuk tahun anggaran 2003 struktur dan format APBD berdasarkan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Pada bab I bagian pertama pasal 2 ayat 1 menyatakan "Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan." Belanja daerah tersebut terbagi menjadi Belanja Administrasi Umum (BAU), Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP), dan Belanja Modal. Belanja Administrasi Umum bersifat rutin karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan selama 1 tahun periode anggaran, sedangkan Belanja Modal dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan sifatnya tidak rutin karena digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya jangka panjang lebih dari 1 tahun periode anggaran.

2.1.5 Tingkat ketergantungan

Konsekuensi negara kesatuan yang berbentuk republik dan sistem desentralisasi pemerintahan, daerah yang memperoleh wewenang pemerintahan baik wewenang atribusi maupun wewenang pelimpahan, senantiasa akan menyelenggarakan wewenangnya sesuai potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, yang di dalamnya termasuk pembangunan daerah, sekalipun pada dasarnya merupakan wewenang daerah, namun dengan keterbatasan yang dimiliki, daerah tetap memerlukan dukungan sumber dana dari pemerintah. Dalam kaitan itulah, lahir Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (telah direvisi dengan UU No 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan wujud perhatian dan bantuan pemerintah dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah.

Secara umum terdapat tiga jenis bantuan (Sidik, 2001: 1), kepada daerah otonom, yaitu:

1. Subsidi, bertujuan untuk mencukupi kebutuhan rutin daerah.
2. Bantuan, bertujuan untuk bantuan pembangunan baik yang bersifat umum maupun khusus.
3. Daftar Isian Proyek (DIP).

Subsidi dan bantuan dapat dikategorikan sebagai bantuan antar tingkat pemerintahan (*Intergovernmental Grants*), dikarenakan subsidi dan bantuan tersebut merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk DIP diklasifikasikan ke dalam *in kind allocation*, dan dana tersebut tidak termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada perkembangan selanjutnya, pada hubungan keuangan pemerintah dan daerah mengalami modifikasi. Bantuan/subsidi tidak diterapkan lagi akan tetapi digantikan dengan pemberian subsidi perimbangan keuangan atau Subsidi Daerah Otonom (SDO).

Bantuan/subsidi dari pemerintah pusat dalam konteks otonomi dan desentralisasi yaitu berupa dana perimbangan yang terdiri Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Indikator tingkat ketergantungan suatu daerah diukur dengan rasio bantuan/subsidi (B) terhadap Total Penerimaan daerah (TPD). Ukuran rasio ini menunjukkan seberapa besar bantuan/subsidi suatu daerah dalam mendominasi total penerimaan daerah.

2.1.6 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi dan pemanfaatannya diatur dan dilakukan oleh pusat. Dengan demikian terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan Negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Indikator tingkat desentralisasi fiskal suatu daerah diukur dengan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah (TPD). Seberapa besarnya proporsi PAD sebagai sumber penerimaan daerah, menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan. Ini berarti bahwa pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan program-program regional, sehingga seluruh pertanggungjawaban pengelolaan dan pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Di kebanyakan daerah, PAD hanya menyumbang 10-30% dari penerimaan APBD pemerintah Kabupaten/Kota, hanya beberapa Kabupaten/Kota saja yang

memiliki PAD lebih dari 50% (Halim.2000). Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang mampu mendayagunakan potensi daerah dalam membangun daerahnya sendiri.

2.1.7 Keuangan Daerah: Sebelum dan Sesudah Otonomi

Kewenangan daerah dalam menjalankan pemerintahannya pada masa orde baru di dasarkan pada UU. No.5 tahun 1974. Disamping mengatur pemerintahan daerah, Undang-undang tersebut juga menjelaskan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, pemerintah mengeluarkan satu paket Undang-undang otonomi daerah, yaitu UU No.22 Tahun 1999 (telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan UU N0 25 Tahun 1999 (telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 22 perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari perintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam UU No 25. Tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua Undang-undang tersebut saling melengkapi (Ismail, 2002).

Dalam perkembangannya format APBD mengalami beberapa perubahan, pada tahun 1998/1999 format APBD Berdasar pada Kepmendagri No. 110 tahun 1998, untuk dana atau bantuan dari pemerintah pusat berupa pos sumbangan dan bantuan, sedangkan format APBD pada tahun 1999/2000 berdasar pada UU No. 25 tahun 1999 dimana dana bantuan dari pusat berupa pos SDO (Subsidi Daerah

Otonom), setelah berlakunya otonomi daerah. dana bantuan dari pusat tersebut berupa pos dana perimbangan yang terdiri Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagi hasil pajak dan bukan pajak sebagai data yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa untuk tahun anggaran 2003 struktur dan format APBD berdasarkan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Pos pengeluaran rutin untuk tahun anggaran 2003 tidak digunakan lagi, maka peneliti menggunakan data pengeluaran rutin dalam penelitian ini adalah pos Belanja Asministrsi Umum (BAU) karena Belanja Administrasi Umum bersifat rutin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan selama 1 tahun periode anggaran.

2.2 Pengembangan Hipotesis

Studi tentang tingkat kemampuan pembiayaan daerah yang dilakukan oleh Yuliati (2001) studi kasus kabupaten Sleman Yogyakarta menyatakan bahwa tingkat kemandirian daerah menjelang diberlakukannya otonomi daerah dilihat dari indikator kemampuan pembiayaan daerah yaitu rasio penerimaan asli daerah (PAD) terhadap pengeluaran rutin (PR) dengan menggunakan uji signifikansi koefisien regresi menghasilkan kecenderungan PAD/PR yang signifikan. Ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan PAD dalam membiayai pengeluaran rutinnya. Data yang digunakan adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta data *time series* kurun waktu tahun 1982/1983-1999/2000,. Setelah melaksanakan otonomi daerah, kabupaten sleman sebagai daerah uji coba pada tahun 1996/1997 menyatakan bahwa kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin meningkat, kecuali pada tahun 1999/2000 kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin tersebut mengalami penurunan. Menurunnya kemampuan PAD tersebut disebabkan oleh pengeluaran rutin yang makin besar terutama untuk membiayai pegawai yang ditransfer dari pusat.

Studi lain tentang tingkat kemampuan pembiayaan daerah juga dilakukan oleh Landiyanto (2005) studi kasus kota Surabaya dalam kurun waktu 1998/1999-2002 dengan menggunakan analisis deskriptif, menyatakan bahwa tingkat kemandirian daerah dilihat dari indikator rasio PAD terhadap pengeluaran rutin (PR) kota Surabaya periode sebelum otonomi daerah maupun setelah otonomi daerah cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, ini dikarenakan

Belum optimalnya penerimaan dari pendapatan Asli Daerah kota Surabaya. Oleh karena itu, pemerintah kota Surabaya perlu meningkatkan penerimaan sumber daya dan penerimaan kota Surabaya dengan meningkatkan penerimaan dari perpajakan dan retribusi daerah.

Berdasarkan dari tinjauan penelitian-penelitian di atas, maka hipotesis dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Tingkat kemampuan pembiayaan pemerintah kabupaten/kota antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat perbedaan yang signifikan

Studi mengenai tingkat ketergantungan daerah dilakukan oleh Nuryadin (2004) dan Landiyanto (2005), di mana pada penelitian deskriptif yang dilakukan Nuryadin studi kasus Kota Magelang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan Kota Magelang dilihat dari indikator rasio bantuan/subsidi (B) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) setelah otonomi daerah lebih besar dibandingkan sebelum otonomi daerah, ini menandakan bahwa tingkat ketergantungan daerah Kota Magelang terhadap bantuan/subsidi dari pemerintah pusat masih besar. Studi lain yang dilakukan oleh Landiyanto menyatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah kota Surabaya periode sebelum otonomi daerah menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi mencapai tingkat 50%, sedangkan pada periode sesudah otonomi daerah menunjukkan penurunan yang sangat drastis hingga pada tingkat 10%.

Berdasarkan dari tinjauan penelitian-penelitian di atas, maka hipotesis dapat dikembangkan sebagai berikut:

H₂: Tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat perbedaan yang signifikan

Studi mengenai tingkat desentralisasi fiskal dilakukan oleh Haryadi (2002) yang merupakan suatu kajian empiris di propinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan kabupaten/kota di propinsi Jawa Timur periode sebelum terjadinya krisis moneter berbeda secara signifikan dibanding periode sesudah krisis. Data yang digunakan adalah realisasi APBD seluruh kabupaten/kota di propinsi Jawa Timur periode dua tahun sebelum krisis yaitu periode anggaran 1995/1996-1996/1997 dan periode dua tahun sesudah krisis yaitu anggaran 1998/1999-1999/2000. dengan menggunakan uji t dua sampel berpasangan (paired sample t test) menyatakan bahwa tingkat desentralisasi fiskal yaitu indikator rasio antara PAD terhadap TPD berbeda secara signifikan, perbedaan tersebut ditunjukkan dengan nilai mean sebelum periode terjadinya krisis moneter lebih tinggi secara signifikan dibandingkan sesudah krisis. Studi lain tentang tingkat desentralisasi fiskal ini dilakukan juga oleh Nuryadin yang menyatakan bahwa tingkat desentralisasi fiskal yang terjadi di Kota Magelang sebelum otonomi daerah lebih tinggi dibandingkan setelah otonomi daerah.

Berdasarkan dari tinjauan penelitian-penelitian di atas, maka hipotesis dapat dikembangkan sebagai berikut:

H₃: Tingkat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat perbedaan yang signifikan

3.3 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder tersebut adalah data tentang realisasi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampel tahun 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil analisis rasio atau hasil pembagian antara dua variabel yang saling berhubungan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti ini mendapatkan data realisasi APBD kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat melalui fasilitas internet dengan alamat website *www.depkeu.go.id*.

3.5 Pengukuran Variabel

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Tingkat Kemampuan Pembiayaan** Tingkat kemampuan pembiayaan daerah yaitu untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam membiayai pengeluaran rutin. Pada penelitian ini diukur dengan analisis rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah pengeluaran rutin (PR).

$$\text{Rasio tingkat kemampuan pembiayaan} = \frac{\text{PAD}}{\text{PR}}$$

2. **Tingkat Ketergantungan.** Tingkat ketergantungan daerah yaitu untuk mengukur seberapa besar porsi bantuan/subsidi yang diterima oleh kabupaten/kota dalam mendominasi penerimaan daerahnya. Pada penelitian ini diukur dengan analisis rasio antara bantuan/subsidi (B) terhadap total penerimaan daerah (TPD).

$$\text{Rasio tingkat kemampuan pembiayaan} = \frac{B}{\text{TPD}}$$

3. **Tingkat desentralisasi fiskal.** Tingkat desentralisasi fiskal yaitu untuk mengukur seberapa besar porsi PAD yang diperoleh kabupaten/kota dalam memaksimalkan penerimaan daerahnya. Pada penelitian ini diukur dengan analisis rasio antara penerimaan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD).

$$\text{Rasio tingkat kemampuan pembiayaan} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}}$$

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan pengujian normalitas. Uji normalitas data yang digunakan tersebut adalah uji nonparametrik yaitu Kolmogorov-Smirnov. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Analisis ini sebagai prasyarat dari uji beda untuk dua sampel yang berpasangan (Paired Sample t Test). Untuk mendeteksi bahwa data tersebut berdistribusi normal jika nilai **asyp. Sig/asymptotic significance (2-tailed)** lebih besar dibandingkan nilai probabilitasnya yaitu 0.05.

3.7 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis-hipotesis di atas menggunakan pengujian statistik parametrik yaitu uji t untuk dua sampel berpasangan (Paired Sample t Test), uji t ini digunakan untuk menguji dua sample yang berpasangan yaitu sampel sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah apakah mempunyai rata-rata tingkat kemampuan pembiayaan, tingkat ketergantungan dan tingkat desentralisasi fiskal daerah secara nyata atau signifikan berbeda atau tidak. Perhitungan pengujian statistik ini menggunakan program SPSS 11.0. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan melihat nilai signifikansi (2-tailed) jika lebih kecil dari probabilitasnya (0.05) maka H_0 ditolak dan sebaliknya jika nilai signifikansi (2-tailed) lebih besar dari probabilitasnya (0.05) maka H_0 gagal ditolak. Apabila ternyata data tidak normal atau seluruhnya tidak normal maka dalam penelitian ini menggunakan pengujian non parametrik.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data bersifat normal ataukah tidak dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Uji ini digunakan untuk menentukan jenis alat analisis dalam melakukan uji beda yaitu uji beda statistik parametrik atau dengan uji beda statistik non parametrik. Pengujian terhadap normalitas data tersebut menggunakan alat uji yaitu one-sample kolmogorov-smirnov test dengan tingkat signifikansi (α)=5%. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari nilai signifikansi 5% maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih kecil dari nilai signifikansi 5% maka data tidak berdistribusi normal.

Berikut ini disajikan hasil uji normalitas data dari masing-masing variabel data periode 3 tahun sebelum otonomi daerah yaitu data dari tahun 1998-2000 dan periode 3 tahun setelah otonomi daerah yaitu tahun 2001-2003.

Tabel 4.1

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov

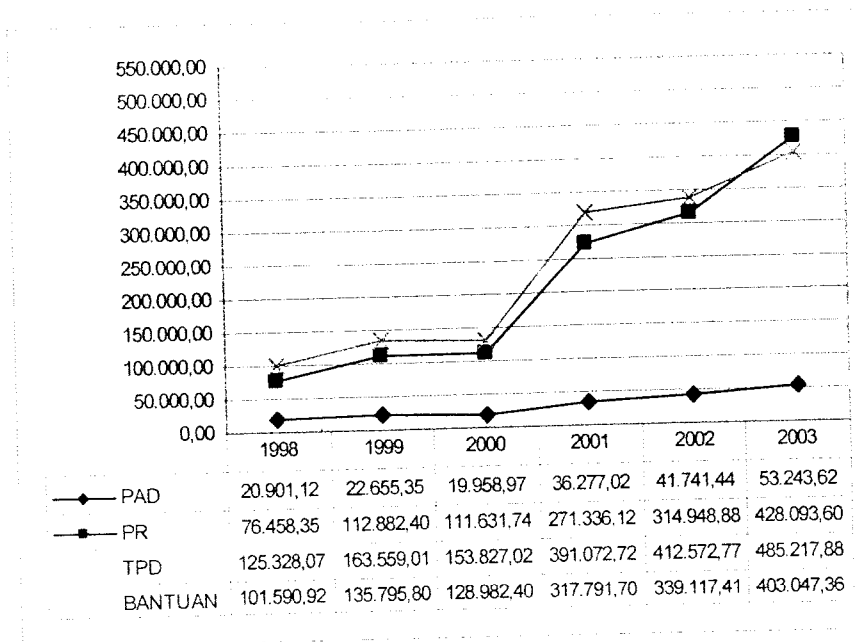
rasio	periode	Asymp. Sig (2-tailed)	keterangan
PAD/PR	sebelum	0,159	normal
	sesudah	0,160	normal
B/TPD	sebelum	0,181	normal
	sesudah	0,382	normal
PAD/TPD	sebelum	0,084	normal
	sesudah	0,078	normal

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas data periode sebelum maupun periode sesudah otonomi daerah dari semua variabel penelitian memiliki nilai Asymp. Sig diatas nilai probabilitas yaitu 5%. Dari hasil tersebut menunjukkan data berdistribusi normal (selengkapnya lihat lampiran). Dengan demikian dalam penelitian ini menggunakan alat analisis parametrik yaitu paired sample t test.

4.2 Analisis Deskripsi Data

Data yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah data tentang realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di propinsi jawa barat. Terdapat 16 pemerintahan kabupaten dan 5 pemerintahan kota sebagai sampel yang dipilih dalam penelitian ini. Data-data tersebut adalah data PAD, Pengeluaran Rutin (PR), Bantuan/subsidi (B), dan Total Penerimaan Daerah (TPD). Berdasarkan Kepmendagri No 29 Tahun 2002 diterapkannya anggaran berbasis kinerja sehingga tidak adanya pos pengeluaran rutin pada laporan APBD tahun 2003, maka peneliti menggunakan pos Belanja Administrasi Umum sebagai data pengeluaran rutin karena data tersebut sifatnya rutin. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah periode 3 tahun sebelum otonomi daerah yaitu tahun 1998/1999, 1999/2000, 2000 dan 3 tahun sesudah otonomi daerah yaitu tahun 2001, 2002, 2003. Analisis data disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel dan Grafik 4.2
Analisis Data Tahun 1998-2003



Catatan: Angka-angka tersebut dalam jutaan rupiah

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata Penerimaan Asli Daerah (PAD) pemerintahan kabupaten/kota di propinsi jawa barat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 1998 besarnya PAD Rp 20.901.120.000 dan pada tahun 1999 sebesar Rp 22.655.350.000 ini menunjukkan adanya peningkatan PAD sebesar Rp 1.754.220.000 (8%), sedangkan pada tahun 2000 besarnya PAD Rp 19.958.970.000 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 1999 sebesar Rp 2.696.370.000 (12%). Penurunan PAD pada tahun 2000 disebabkan karena periode anggaran pada tahun tersebut hanya selama 9 bulan karena pada tanggal 1 Januari 2001 dimulainya otonomi daerah yang periode anggarannya per 31 Desember. Pada tahun 2001 awal otonomi daerah sudah diberlakukan besarnya PAD Rp 36.277.000.000 menunjukkan peningkatan yang

cukup tinggi dibandingkan tahun 2000 sebesar Rp 16.318.050.000 (82%), pada tahun 2002 besarnya PAD Rp 41.741.440.000 meningkat sebesar Rp 5.464.420.000 (15%) dibandingkan tahun 2001, sedangkan pada tahun 2003 besarnya PAD Rp 53.243.000 meningkat sebesar Rp 11.502.180.000 (28%). Dari data diatas dapat dikatakan bahwa dengan diberlakukanya otonomi daerah pemerintah kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat dapat meningkatkan peran PAD dalam penerimaan daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahannya sendiri.

Data mengenai Pengeluaran Rutin (PR) pada tahun 1998 besarnya Rp 76.458.350.000 dan pada tahun 1999 sebesar Rp 112.882.400.000 adanya peningkatan sebesar Rp 36.424.050.000 (48%), sedangkan pada tahun 2000 besarnya PAD Rp 111.631.740.000 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 1999 sebesar Rp 1.250.670.000 (1%). Penurunan pengeluaran rutin pada tahun 2000 disebabkan karena periode anggaran pada tahun tersebut hanya selama 9 bulan karena pada tanggal 1 januari 2001 dimulainya otonomi daerah yang periode anggarannya per 31 Desember. Pada tahun 2001 pengeluaran rutin Rp 271.366.120.000 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2000 sebesar Rp 159.704.390.000 (143%), pada tahun 2002 besarnya pengeluaran rutin Rp 314.948.880.000 meningkat sebesar Rp 43.612.760.000 (16%) dibandingkan tahun 2001, sedangkan pada tahun 2003 besarnya pengeluaran rutin Rp 428.093.600.000 meningkat sebesar Rp 113.144.710.000 (35.92%). Dari data diatas dapat dikatakan bahwa periode setelah diberlakukanya

otonomi daerah pengeluaran rutin meningkat cukup tinggi terutama disebabkan karena adanya transfer pegawai dari pusat dan adanya kenaikan gaji pegawai.

Pada tahun 1998 besarnya Total Penerimaan Daerah (TPD) Rp 125.328.070.000 dan pada tahun 1999 sebesar Rp 163.559.010.000, adanya peningkatan sebesar Rp 38.230.940.000 (31%), sedangkan pada tahun 2000 besarnya TPD Rp 153.827.020.000 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 1999 sebesar Rp 9.732.000.000 (6%). Penurunan TPD pada tahun 2000 disebabkan karena periode anggaran pada tahun tersebut hanya selama 9 bulan karena pada tanggal 1 Januari 2001 dimulainya otonomi daerah yang periode anggarannya per 31 Desember. Pada tahun 2001 TPD Rp 391.072.720.000 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2000 sebesar Rp 237.245.700.000 (154%), pada tahun 2002 besarnya TPD Rp 412.752.770.000 meningkat sebesar Rp 21.500.050.000 (5%) dibandingkan tahun 2001, sedangkan pada tahun 2003 besarnya TPD Rp 485.217.880.000 meningkat sebesar Rp 72.645.120.000 (18%) dibandingkan tahun 2002.

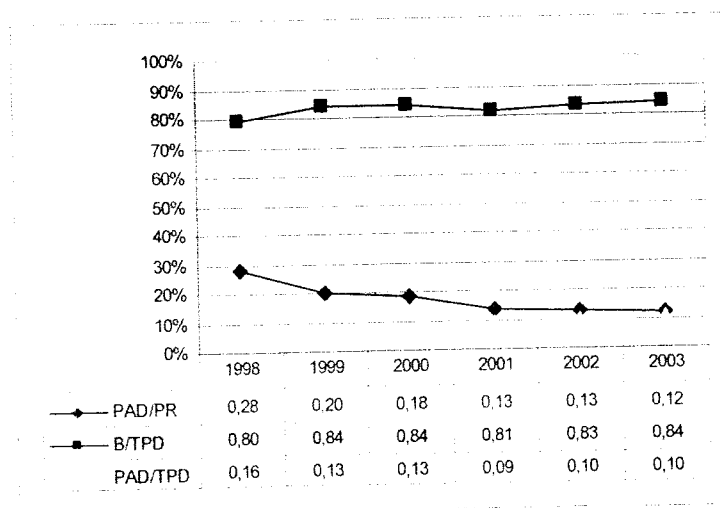
Selanjutnya data mengenai bantuan/subsidi (B) Pada tahun 1998 besarnya bantuan/subsidi (B) Rp 101.590.520.000 dan pada tahun 1999 sebesar Rp 135.795.800.000, meningkat Rp 34.204.870.000 (34%), sedangkan pada tahun 2000 besarnya bantuan/subsidi Rp 128.962.400.000 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 1999 sebesar Rp 6.813.390.000 (5%). Pada tahun 2001 besarnya bantuan/subsidi Rp 317.791.700.000 menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan tahun 2000 sebesar Rp 188.809.300.000 (146%), pada tahun 2002 besarnya bantuan/subsidi Rp 339.117.410.000 meningkat sebesar

Rp 21.325.710.000 (7%) dibandingkan tahun 2001, sedangkan pada tahun 2003 besarnya bantuan/subsidi Rp 403.047.360.000 meningkat sebesar Rp 3.929.950.000 (19%) dibandingkan tahun 2002. Dari data diatas dapat dikatakan bahwa periode setelah diberlakukanya otonomi daerah sumbangan/bantuan dari pemerintah pusat masih nyata dan menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi.

4.3 Analisis Data Rasio

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PAD, Pengeluaran Rutin (PR), Total Penerimaan Daerah (TPD) dan Bantuan/subsidi (B) yang telah dihitung dan dianalisis dengan analisis rasio berdasarkan masing-masing variabel kemandirian daerah yaitu tingkat kemampuan pembiayaan (rasio PAD/PR), tingkat ketergantungan (rasio B/TPD), dan tingkat desentralisasi fiskal (rasio PAD/TPD). Analisis rasio tersebut menggunakan program Microsoft Excel (selengkapnya lihat lampiran).

Tabel dan Grafik 4.3
Analisis Data Rasio 1998-2003



1. **Tingkat Kemampuan Pembiayaan.** diukur dengan rasio Penerimaan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengeluaran Rutin (PR). Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Periode sebelum diberlakukannya otonomi daerah yaitu pada tahun 1998, 1999, dan 2000 masing-masing sebesar 28%, 20% dan 18% sedangkan pada periode sesudah diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, 2002 dan 2003 masing-masing sebesar 13%, 13% dan 12%. Penurunan ini terjadi pada periode sesudah otonomi daerah disebabkan naiknya pengeluaran rutin yang cukup tinggi terutama pada tahun 2001 yang mencapai 143% dibandingkan periode sebelum otonomi daerah, begitu pula dengan PAD pada periode sesudah otonomi daerah juga mengalami kenaikan terutama pada tahun 2001 yang mencapai 82% dibandingkan periode sebelum otonomi daerah (tahun 2000). Seiring dengan naiknya Penerimaan Asli Daerah (PAD) pada masa otonomi daerah diikuti dengan naiknya pengeluaran rutin yang sangat tinggi. Kenaikan pengeluaran rutin lebih besar dibandingkan kenaikan PAD, sehingga kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin pada periode sesudah otonomi daerah lebih kecil dibandingkan periode sebelum otonomi daerah.
2. **Tingkat Ketergantungan,** diukur dengan rasio Bantuan/subsidi (B) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Dari grafik diatas menunjukkan tingginya bantuan/subsidi yang mendominasi penerimaan daerah. Pada periode sebelum otonomi daerah rasio B/TPD pada tahun 1998, 1999, dan 2000 masing-masing sebesar 80%, 84% dan 84%. Sedangkan pada periode setelah otonomi daerah besarnya bantuan/subsidi pada tahun 2001, 2002, dan 2003 masing-masing

adalah 81%, 83%, dan 84%. Dari grafik diatas Sumbangan/bantuan dari tahun ke tahun hampir menggambarkan pola garis lurus, artinya bahwa Sumbangan/bantuan dari pemerintah pusat sangat tinggi terhadap penerimaan daerah berkisar 80-84%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Propinsi Jawa Barat dengan diberlakukannya otonomi daerah Sumbangan/bantuan dari pemerintah pusat masih nyata. Hal ini disebabkan karena kemampuan PAD dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah masih sangat rendah.

3. **Tingkat Desentralisasi Fiskal**, diukur dengan rasio Penerimaan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa rasio PAD/TPD dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Periode sebelum diberlakukannya otonomi daerah yaitu pada tahun 1998, 1999, dan 2000 masing-masing sebesar 16%, 13% dan 13% sedangkan pada periode sesudah diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, 2002 dan 2003 masing-masing sebesar 9%, 10% dan 10%. Rendahnya rasio PAD/TPD yang terjadi pada periode setelah otonomi daerah dibandingkan periode sebelum otonomi daerah menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat belum mampu memaksimalkan kewenangan dan tanggung jawab terhadap sumber-sumber penerimaan negara yang dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah.

4.4 Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan profil atau karakteristik sampel serta untuk mengetahui kemungkinan pola distribusi data. Profil atau karakteristik data digunakan untuk memberikan gambaran hasil dengan menggunakan jumlah sampel, nilai maksimum, nilai minimum, mean dan standar deviasi. Penyajian statistik deskriptif masing-masing rasio disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Rasio	N		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD/PR	63	sebelum	0,06	0,71	0,2189	0,14569
	63	sesudah	0,02	0,34	0,1275	0,07091
B/TPD	63	sebelum	0,59	0,95	0,8240	0,10020
	63	sesudah	0,60	0,96	0,8289	0,07769
PAD/TPD	63	sebelum	0,05	0,34	0,1406	0,08260
	63	sesudah	0,02	0,23	0,0963	0,04719

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata rasio PAD/PR sebelum otonomi daerah adalah 0.2189 (21.89%) dengan nilai standar deviasi 0.14569 lebih besar dibandingkan sesudah otonomi daerah yaitu 0.1275 (12.75%) dengan nilai standar deviasi 0.07091. Pada rasio B/TPD nilai rata-rata sebelum otonomi daerah adalah 0.8240 (82.40%) dengan nilai standar deviasi 0.10020 lebih kecil sedikit dibandingkan sesudah otonomi daerah yaitu 0.8289 (82.89%) dengan nilai standar deviasi 0.07769. Sedangkan pada rasio PAD/TPD nilai rata-rata sebelum otonomi daerah adalah 0.1406 dengan nilai standar deviasi 0.08260 lebih besar dibandingkan sesudah otonomi daerah yaitu 0.0963 dengan nilai standar deviasi 0.04719.

4.5 Analisis Hasil Uji Statistik

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda dua rata-rata (paired sample t test) yang bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata kemandirian daerah dalam bentuk tingkat kemampuan pembiayaan, tingkat ketergantungan, dan tingkat desentralisasi fiskal periode sebelum otonomi daerah dengan periode setelah otonomi daerah adanya perbedaan secara signifikan. Analisis ini juga akan mendukung hasil dari analisis data yang telah diuraikan sebelumnya.

Berikut ini disajikan tabel hasil analisis paired sample t test dari semua variabel yang di uji (selengkapnya lihat lampiran).

Tabel 4.5

Uji Paired Sample t Test

rasio	Mean		signifikansi (2-tailed)	keterangan
	sebelum	sesudah		
PAD/PR	0,2189	0,1279	0,000	Ho Ditolak
B/TPD	0,8240	0,8289	0,643	Ho gagal Ditolak
PAD/TPD	0,1406	0,0963	0,000	Ho Ditolak

1. **Tingkat Kemampuan Pembiayaan**, hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05, dengan demikian hasil tersebut menolak H_0 yang berarti adanya perbedaan yang signifikan rasio PAD terhadap PR antara periode sebelum dengan periode setelah diberlakukannya otonomi daerah,. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari nilai mean periode sebelum dan sesudah otonomi daerah masing-masing sebesar 0.2189 (21.89%) dan 0.1279 (12.79%). Hal ini menunjukkan tingkat kemampuan pembiayaan daerah periode sebelum

otonomi daerah lebih besar secara signifikan dibandingkan periode sesudah otonomi daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian deskriptif yang dilakukan oleh Landiyanto (2005) menyatakan bahwa rasio PAD terhadap pengeluaran rutin setelah otonomi daerah lebih rendah dibandingkan sebelum otonomi daerah, namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliati (2001) bahwa rasio PAD terhadap PR setelah otonomi daerah meningkat, hal ini disebabkan PAD yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang tinggi sehingga kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin cukup tinggi.

2. **Tingkat Ketergantungan**, hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0.643 lebih besar dari nilai probabilitas 0.05, dengan demikian hasil tersebut tidak dapat menolak H_0 yang berarti tidak adanya perbedaan signifikan rasio Sumbangan/bantuan (B) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) antara periode sebelum dengan periode setelah diberlakukannya otonomi daerah. Jika dilihat dari nilai mean periode sebelum dan sesudah otonomi daerah masing-masing sebesar 0.8240 (82.40%) dan 0.8289 (82.89%) yang menunjukkan periode sesudah otonomi daerah lebih tinggi dibandingkan periode sebelum otonomi daerah, tapi perbedaan tersebut tidak signifikan atau tidak mempunyai arti. Hasil ini sesuai dengan pola grafik analisis data rasio yang menggambarkan hampir membentuk garis lurus. Ini menunjukkan bahwa diberlakukannya atau tidak diberlakukannya otonomi daerah tidak memberikan

dampak terhadap kemandirian daerah dalam bentuk tingkat ketergantungan dari pemerintah pusat. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuryadin (2004), namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Landiyanto (2005) bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Surabaya setelah otonomi daerah menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan sebelum otonomi daerah.

3. **Tingkat Desentralisasi Fiskal**, hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05, dengan demikian hasil tersebut menolak H_0 yang berarti adanya perbedaan yang signifikan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) antara periode sebelum dengan periode setelah diberlakukannya otonomi daerah. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari nilai mean periode sebelum dan sesudah otonomi daerah masing-masing sebesar 0.1406 (14.06%) dan 0.0963 (9.63%) yang menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal periode sebelum otonomi daerah lebih besar secara signifikan dibandingkan periode sesudah otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode setelah otonomi daerah pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat belum mampu melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan dari pemerintah pusat dalam mengelola sumber-sumber penerimaan negara. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryadi (2002) menyatakan bahwa adanya perbedaan yang signifikan rasio PAD terhadap TPD dan penelitian

deskriptif yang dilakukan oleh Nuryadin (2004) bahwa rasio PAD terhadap TPD setelah otonomi daerah menunjukkan lebih rendah dibandingkan sebelum otonomi daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan uji statistik maka peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Periode setelah diberlakukannya otonomi daerah rata-rata Penerimaan Asli daerah (PAD), Pengeluaran Rutin (PR), Bantuan/subsidi (B) dan Total Penerimaan Daerah (TPD) Pemerintah Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat dalam setiap tahunnya menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan sebelum otonomi daerah, Hal ini berarti dengan diberlakukannya otonomi daerah memberikan dampak terhadap peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD), Total Penerimaan Daerah (TPD) dan Pengeluaran Rutin (PR). Namun memberikan dampak pula terhadap peningkatan bantuan/subsidi dari pemerintah pusat.
- Berdasarkan hasil uji analisis statistik pada rasio PAD terhadap PR menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah, perbedaan nilai rata-rata rasio tersebut menunjukkan sebelum otonomi daerah lebih tinggi secara signifikan dibandingkan setelah otonomi daerah, dengan demikian kemandirian daerah dalam bentuk tingkat kemampuan pembiayaan daerah masih relatif rendah. Hal ini disebabkan pada masa otonomi daerah besarnya pengeluaran rutin daerah meningkat sangat tinggi, terutama angka

belanja pegawai yang sangat tinggi, salah satunya karena adanya kenaikan gaji pegawai pada periode tersebut, sedangkan peningkatan PAD menunjukkan peningkatan yang tidak terlalu tinggi. Peningkatan pengeluaran rutin tersebut tidak sebanding dengan peningkatan PAD, sehingga kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin pada periode setelah otonomi daerah lebih rendah.

- Berdasarkan hasil uji analisis statistik pada rasio B terhadap TPD menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah, hal ini disebabkan karena besarnya Bantuan/ subsidi dari pemerintah pusat yang masih mendominasi sangat tinggi baik sebelum otonomi maupun sesudah otonomi daerah. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya otonomi daerah tidak memberikan dampak terhadap kemandirian daerah dalam bentuk tingkat ketergantungan dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan Penerimaan Asli Daerah yang sangat rendah, sedangkan pengeluaran rutin yang sangat tinggi, sehingga dalam memenuhi kebutuhan rutinnya pemerintah daerah membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.
- Berdasarkan hasil uji analisis statistik pada rasio PAD terhadap TPD menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan, perbedaan tersebut menunjukkan rata-rata rasio tersebut sebelum otonomi daerah lebih besar dibandingkan periode setelah otonomi daerah, dengan demikian bahwa kemandirian daerah dalam bentuk tingkat desentralisasi fiskal masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode

daerah. Hendaknya pemerintah daerah melakukan pembenahan manajemen penerimaan daerah khususnya Penerimaan Asli Daerah (PAD) agar dapat menghsailkan sumber pembiayaan yang maksimal sehingga dapat memperkecil tingkat ketergantungan terhadap bantuan/subsidi dari pemerintah pusat.

- Bagi kalangan akademisi, penelitian mengenai kemandirian daerah perlu dikembangkan lebih luas, selain menambah khasanah kepustakaan juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan daerah dalam masa otonomi daerah sekarang ini.

5.3 Keterbatasan Penelitian

- Penelitian ini bersifat studi kasus, artinya sampel tidak berasal dari seluruh propinsi di Indonesia sebagai suatu populasinya, sehingga simpulan yang diambil mungkin hanya berlaku pada propinsi Jawa Barat.
- Tolok ukur atau variabel tingkat kemampuan pembiayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dan tingkat desentralisasi fiskal yang digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu di antaranya dari beberapa tolok ukur yang ada.
- Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tiga tahun sebelum otonomi daerah yaitu tahun anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2000 dan tiga tahun sesudah otonomi daerah yaitu tahun anggaran 2001, 2002, 2003.

5.4 Saran Penelitian Berikutnya

- Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih luas.
- Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan tolok ukur atau variabel yang lebih luas agar hasil penelitian lebih kompetitif.
- Periode pengamatan untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan lebih dari tiga tahun periode pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryadi, Bambang, *Analisis pengaruh Fiscal Stress terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menghadapi pelaksanaan Otonomi Daerah: suatu kajian empiris di Propinsi Jawa Timur*, Simposium Nasional Akuntansi V, 2002.
- Haris, Syamsuddin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005.
- Halim, Abdul, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP, AMP YKPN, 2001.
- Kuncoro, Mudrajad, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia: dilema otonomi dan ketergantungan*, Prisma, No. 4, 1995, hal 3-17.
- Mardiasmo, *Manajemen Penerimaan Daerah dan Struktur APBD dalam era Otonomi Daerah*, KEBI STIEKERS, 2001, hal 1-13.
- _____, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, edisi pertama, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Musgrave & Musgrave, *Keuangan Negara dalam Teori Dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Nuryadin, Didin, *Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Kota Magelang*, Buletin Ekonomi, 2004, Vol. 2, No.2, hal 136-156.

- Sidik, Machfud, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 2002, hal 1-14.
- Sumodiningrat, *Kebijaksanaan Pembiayaan Pembangunan dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Otonomi Daerah: Retrospek dan Prospek pada Pelita VII, Bappeda Kabupaten Sleman dan MAP-UGM, Yogyakarta, 10 Maret 1997.
- _____, *Aspek Makro Pengelolaan Keuangan Daerah*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Temu Alumni KKD, FE-UGM, Yogyakarta, 11-12 April 1997.
- Sudantoko, Djoko, *Dilema Otonomi Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2003.
- Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yuliati, Asnafiah, *Kemandirian dan pertumbuhan ekonomi dalam menyongsong Otonomi Daerah: Studi kasus Kabupaten Sleman, DIY*, Jurnal KEBI STIEKERS, hal 14-23, 1996.

LAMP IRAN

DATA REALISASI APBD TAHUN 1998-2003
(Angka dalam jutaan rupiah)

NO		TAHUN 1998				TAHUN 1999				TAHUN 2000			
		PAD	PR	TPD	B	PAD	PR	TPD	B	PAD	PR	TPD	B
	Kab/Kota	12.694,53	52.938,29	89.937,21	76.078,50	48.171,12	291.753,50	372.616,09	324.444,97	50.367,25	330.010,17	471.684,60	414.991,88
1	KAB BANDUNG	39.772,42	203.090,35	325.615,84	284.871,71	23.851,25	89.581,98	154.212,35	116.944,28	22.586,54	89.058,99	152.069,56	113.515,22
2	KAB BEKASI	24.408,53	68.112,83	108.260,66	76.679,72	71.964,96	193.486,48	344.657,42	257.409,46	56.184,78	182.064,44	255.776,77	189.688,69
3	KAB BOGOR	57.038,46	161.974,12	237.447,73	177.505,84	8.973,52	124.766,95	171.277,43	159.531,67	7.743,90	122.981,34	155.396,78	143.946,08
4	KAB CIAMIS	6.712,70	93.046,83	123.667,40	115.410,49	8.409,72	116.032,69	162.887,56	151.857,63	10.190,42	102.527,89	135.893,88	125.187,43
5	KAB CIANJUR	7.515,81	83.097,96	126.227,80	118.241,86	12.543,26	103.724,67	149.780,62	133.383,28	8.816,47	99.618,02	133.300,23	124.443,75
6	KAB CIREBON	9.863,65	77.051,20	148.850,97	123.760,82	9.989,62	139.073,94	177.363,55	164.334,19	9.018,96	139.127,26	168.999,49	159.343,52
7	KAB GARUT	12.066,10	45.002,51	93.839,98	80.469,59	12.039,21	94.015,70	138.427,41	126.114,87	7.839,92	95.620,95	122.318,01	114.478,09
8	KAB INDRAMAYU	5.662,81	66.666,24	116.619,64	110.913,86	35.302,81	122.257,18	179.237,63	134.733,08	24.901,50	112.471,44	149.183,70	117.657,20
9	KAB KARAWANG	30.030,07	91.680,70	138.415,41	102.253,96	6.543,22	78.727,07	110.279,91	102.299,26	5.626,26	79.269,08	99.513,79	91.433,60
10	KAB KUNINGAN	4.407,40	47.451,95	69.469,26	62.075,79	6.296,38	87.948,48	116.275,60	107.105,73	6.774,25	85.077,87	117.633,84	110.096,36
11	KAB MAJALENGKA	4.151,72	25.415,77	77.087,94	49.406,79	17.083,76	60.000,66	87.110,49	66.705,43	15.588,33	60.213,71	83.758,12	66.339,73
12	PURWAKARTA	35.361,17	49.885,35	104.491,35	65.567,68	13.702,18	96.034,52	132.502,63	115.416,08	9.665,06	89.451,57	112.389,98	102.180,43
13	KAB SUBANG	8.791,12	68.973,85	94.297,32	85.220,54	8.606,53	102.450,35	172.333,03	158.909,05	12.253,27	104.682,36	168.038,78	147.209,17
14	KAB SUKABUMI	6.688,77	75.011,33	120.651,43	112.770,54	16.787,53	94.834,07	136.527,90	116.521,08	16.151,98	83.020,16	111.835,18	92.625,64
15	KAB SUMEDANG	33.807,86	75.848,71	145.819,11	109.715,14	13.739,53	163.307,49	178.871,46	162.734,56	12.664,95	149.472,85	182.276,02	165.782,23
16	TASIKMALAYA	12.818,10	52.389,96	66.804,74	72.806,38	94.386,05	200.727,05	320.081,51	204.806,32	75.449,35	194.661,44	272.771,18	191.622,79
17	KOTA BANDUNG	20.507,67	43.563,88	73.217,12	52.709,45	16.425,06	63.991,07	91.810,92	70.485,51	14.647,47	67.120,38	85.047,40	66.795,94
18	KOTA BOGOR	19.971,60	53.094,53	78.524,43	53.766,91	14.035,10	46.432,99	66.169,86	50.338,34	13.447,93	44.354,55	64.949,00	47.392,88
19	KOTA CIJERON	13.966,80	27.307,73	47.362,30	31.900,84	8.079,78	35.137,04	51.552,85	42.189,31	8.124,46	39.177,09	59.068,15	47.909,04
20	KOTA SUKABUMI	72.667,65	144.021,32	225.281,86	139.445,32	28.831,67	66.246,62	120.763,05	85.467,61	31.095,36	74.284,90	128.462,90	76.001,01
21	KOTA BEKASI	20.901,12	76.458,35	125.328,07	101.590,92	22.555,35	112.882,40	163.559,01	135.795,80	19.958,97	111.631,74	153.827,02	128.982,40
	Rata-rata												

NO	TAHUN 2001						TAHUN 2002						TAHUN 2003											
	PR		TPD		B		PR		TPD		B		PR		TPD		B							
	PAD		PAD		PAD		PAD		PAD		PAD		PAD		PAD		PAD							
1	78.716,97	626.550,68	915.894,49	826.845,91	66.119,44	626.882,58	841.550,79	742.066,50	86.634,86	928.920,04	979.742,59	831.992,72	52.505,34	217.065,26	440.692,53	339.333,38	53.252,40	280.213,85	473.843,59	318.753,95	105.380,95	411.939,32	524.046,17	393.781,80
2	100.680,64	412.939,80	700.151,36	560.266,54	103.084,48	506.219,73	716.407,10	561.733,78	136.981,34	749.757,31	810.084,06	652.302,72	12.781,51	308.836,41	394.091,83	325.985,69	16.388,00	395.056,99	430.577,19	384.965,51	21.497,64	519.139,78	542.594,21	470.342,70
3	17.397,38	269.716,43	385.287,47	326.685,81	22.883,94	311.914,90	407.164,27	364.090,33	28.832,13	402.017,62	468.122,69	439.290,56	20.090,70	251.856,26	367.167,76	324.133,10	21.681,48	307.247,55	403.028,07	358.311,11	35.249,18	379.076,04	410.639,17	370.400,00
4	20.178,23	357.005,83	455.644,40	397.202,03	30.190,99	422.963,49	475.273,30	423.068,67	30.311,46	517.866,79	570.787,27	539.475,81	15.526,18	234.853,94	297.903,54	265.058,31	41.682,07	262.611,92	366.695,89	322.025,21	37.631,08	380.775,37	486.148,54	387.154,84
5	48.671,96	269.892,07	385.226,01	301.485,18	50.083,64	298.315,40	427.730,90	353.061,10	59.444,10	409.285,94	528.466,50	469.022,50	12.095,00	185.697,86	255.189,53	14.881,59	247.272,06	270.287,56	253.405,97	19.121,86	332.718,04	366.268,30	312.383,17	
6	13.190,57	216.255,24	278.923,75	250.905,73	16.431,19	237.444,87	295.485,98	264.894,27	21.577,19	346.492,11	374.430,84	324.783,27	28.815,13	150.167,04	203.187,27	161.155,69	37.550,83	192.983,54	239.228,35	189.831,22	35.543,25	227.417,32	313.207,32	229.862,73
7	23.989,04	222.016,81	312.003,88	263.771,22	24.272,58	257.566,56	327.045,49	287.796,10	32.771,46	310.130,34	429.643,66	385.322,20	23.991,94	251.846,34	394.588,95	327.144,66	23.194,22	276.781,59	395.179,53	349.062,38	27.347,11	438.472,29	455.534,42	416.348,31
8	29.241,12	232.318,58	276.883,64	220.985,15	30.645,19	288.144,23	322.011,70	286.889,94	40.006,61	365.116,46	406.676,54	321.560,21	23.991,94	251.846,34	394.588,95	327.144,66	23.194,22	276.781,59	395.179,53	349.062,38	27.347,11	438.472,29	455.534,42	416.348,31
9	25.739,84	365.227,44	463.235,21	405.510,95	6.887,88	352.557,05	381.719,17	345.530,03	10.991,60	376.089,83	372.633,84	356.362,34	25.739,84	365.227,44	463.235,21	405.510,95	6.887,88	352.557,05	381.719,17	345.530,03	10.991,60	376.089,83	372.633,84	356.362,34
10	123.984,49	562.288,17	781.262,48	471.988,16	188.444,98	676.065,14	902.793,03	559.372,00	220.020,82	857.747,52	954.665,80	593.144,98	123.984,49	562.288,17	781.262,48	471.988,16	188.444,98	676.065,14	902.793,03	559.372,00	220.020,82	857.747,52	954.665,80	593.144,98
11	26.787,46	160.436,20	232.806,15	182.033,24	28.288,18	185.393,28	245.507,29	196.752,00	33.470,34	365.513,57	302.700,54	254.160,64	26.787,46	160.436,20	232.806,15	182.033,24	28.288,18	185.393,28	245.507,29	196.752,00	33.470,34	365.513,57	302.700,54	254.160,64
12	23.022,40	121.082,90	162.025,09	120.492,78	25.744,19	141.075,28	187.703,43	154.287,50	30.179,41	160.426,15	218.282,24	175.105,24	23.022,40	121.082,90	162.025,09	120.492,78	25.744,19	141.075,28	187.703,43	154.287,50	30.179,41	160.426,15	218.282,24	175.105,24
13	13.234,59	88.632,54	132.439,30	96.933,96	15.073,72	112.278,07	158.663,97	120.864,71	21.536,80	145.550,11	184.857,94	146.291,85	13.234,59	88.632,54	132.439,30	96.933,96	15.073,72	112.278,07	158.663,97	120.864,71	21.536,80	145.550,11	184.857,94	146.291,85
14	52.178,92	193.392,81	377.922,45	286.066,69	59.789,17	234.938,45	396.131,55	304.723,40	83.586,81	365.513,57	490.042,84	394.906,03	52.178,92	193.392,81	377.922,45	286.066,69	59.789,17	234.938,45	396.131,55	304.723,40	83.586,81	365.513,57	490.042,84	394.906,03
15	36.277,02	271.336,12	391.072,72	317.791,70	41.741,44	314.948,88	412.572,77	339.117,41	53.243,62	428.093,60	485.217,88	403.047,36	36.277,02	271.336,12	391.072,72	317.791,70	41.741,44	314.948,88	412.572,77	339.117,41	53.243,62	428.093,60	485.217,88	403.047,36

DATA RASIO TAHUN 1998-2003

NO	tahun 1998		tahun 1999		tahun 2000		tahun 2001		tahun 2002		tahun 2003							
	pad/pr	b/tpd	pad/tpd	pad/pr	b/tpd	pad/tpd	pad/pr	b/tpd	pad/tpd	pad/pr	b/tpd	pad/tpd	pad/pr	b/tpd	pad/tpd			
KABIKOTA	0.24	0.85	0.14	0.17	0.87	0.13	0.15	0.88	0.11	0.13	0.90	0.09	0.11	0.88	0.08	0.09	0.85	0.09
1KAB BANDUNG	0.20	0.87	0.12	0.27	0.76	0.15	0.25	0.75	0.15	0.24	0.77	0.12	0.19	0.67	0.11	0.17	0.75	0.20
2KAB BEKASI	0.36	0.71	0.23	0.37	0.75	0.21	0.31	0.74	0.22	0.24	0.80	0.14	0.20	0.78	0.14	0.18	0.81	0.17
3KAB BOGOR	0.35	0.75	0.24	0.07	0.93	0.05	0.06	0.93	0.05	0.04	0.83	0.03	0.04	0.89	0.04	0.04	0.87	0.04
4KAB CIAMIS	0.07	0.93	0.05	0.07	0.93	0.05	0.10	0.92	0.07	0.06	0.85	0.05	0.07	0.89	0.06	0.06	0.94	0.06
5KAB CIANJUR	0.09	0.94	0.06	0.12	0.89	0.08	0.09	0.93	0.07	0.08	0.88	0.05	0.07	0.89	0.05	0.06	0.90	0.09
6KAB CIREBON	0.13	0.83	0.07	0.07	0.93	0.06	0.06	0.94	0.05	0.06	0.87	0.04	0.07	0.89	0.06	0.07	0.95	0.05
7KAB GARUT	0.27	0.86	0.13	0.13	0.91	0.09	0.08	0.94	0.06	0.07	0.89	0.05	0.16	0.88	0.11	0.13	0.80	0.08
8KAB INDRAMAYU	0.08	0.95	0.05	0.29	0.75	0.20	0.22	0.79	0.17	0.18	0.78	0.13	0.17	0.83	0.12	0.14	0.89	0.11
9KAB KARAWANG	0.33	0.74	0.22	0.08	0.93	0.06	0.07	0.92	0.06	0.07	0.86	0.05	0.06	0.94	0.06	0.06	0.85	0.05
10KAB KUNINGAN	0.09	0.89	0.06	0.07	0.92	0.05	0.08	0.94	0.05	0.06	0.90	0.05	0.07	0.90	0.06	0.06	0.87	0.06
11KAB MAJALENGKA	0.16	0.64	0.05	0.28	0.77	0.20	0.26	0.79	0.19	0.19	0.79	0.14	0.19	0.79	0.16	0.20	0.73	0.11
12KAB PURWAKARTA	0.71	0.63	0.34	0.14	0.87	0.10	0.11	0.91	0.09	0.11	0.85	0.08	0.09	0.88	0.07	0.08	0.90	0.08
13KAB SUBANG	0.13	0.90	0.09	0.08	0.92	0.05	0.12	0.88	0.07	0.10	0.83	0.06	0.08	0.88	0.06	0.07	0.91	0.06
14KAB SUKABUMI	0.09	0.93	0.06	0.18	0.85	0.12	0.19	0.83	0.14	0.12	0.80	0.10	0.10	0.83	0.10	0.11	0.79	0.10
15KAB SUMEDANG	0.45	0.75	0.23	0.08	0.91	0.08	0.08	0.91	0.07	0.07	0.88	0.06	0.06	0.91	0.02	0.02	0.96	0.03
16KAB TASIKMALAYA	0.24	0.84	0.15	0.47	0.64	0.29	0.39	0.70	0.28	0.22	0.60	0.16	0.28	0.62	0.21	0.34	0.62	0.23
17KOTA BANDUNG	0.47	0.72	0.28	0.26	0.77	0.18	0.22	0.79	0.17	0.17	0.78	0.12	0.13	0.80	0.10	0.12	0.84	0.11
18KOTA BOGOR	0.38	0.68	0.25	0.30	0.76	0.21	0.30	0.73	0.21	0.19	0.74	0.14	0.15	0.82	0.12	0.14	0.80	0.14
19KOTA CIREBON	0.51	0.67	0.29	0.23	0.82	0.16	0.21	0.81	0.14	0.15	0.73	0.10	0.18	0.76	0.14	0.18	0.79	0.12
20KOTA SUKABUMI	0.50	0.62	0.32	0.44	0.71	0.24	0.42	0.59	0.24	0.27	0.76	0.14	0.25	0.77	0.15	0.20	0.81	0.17
21KOTA BEKASI	0.28	0.80	0.16	0.20	0.84	0.13	0.18	0.84	0.13	0.13	0.81	0.09	0.13	0.83	0.10	0.12	0.84	0.10
rata-rata	0.28	0.80	0.16	0.20	0.84	0.13	0.18	0.84	0.13	0.13	0.81	0.09	0.13	0.83	0.10	0.12	0.84	0.10

Rasio PAD/PR

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SEBELUM	63	,06	,71	,2189	,14569
SESUDAH	63	,02	,34	,1275	,07091
Valid N (listwise)	63				

Rasio B/TPD

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SEBELUM	63	,59	,95	,8240	,10020
SESUDAH	63	,60	,96	,8289	,07769
Valid N (listwise)	63				

Rasio PAD/TPD

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SEBELUM	63	,05	,34	,1406	,08260
SESUDAH	63	,02	,23	,0963	,04719
Valid N (listwise)	63				

PAD/PR Sebelum Otonomi Daerah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PADPR
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,2189
	Std. Deviation	,14569
Most Extreme Differences	Absolute	,142
	Positive	,142
	Negative	-,138
Kolmogorov-Smirnov Z		1,126
Asymp. Sig. (2-tailed)		,159

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

PAD/PR Setelah Otonomi Daerah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PADPR
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,1279
	Std. Deviation	,06945
Most Extreme Differences	Absolute	,142
	Positive	,142
	Negative	-,085
Kolmogorov-Smirnov Z		1,124
Asymp. Sig. (2-tailed)		,160

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Rasio B/TPD Sebelum Otonomi Daerah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		BTPD
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,8240
	Std. Deviation	,10020
Most Extreme Differences	Absolute	,138
	Positive	,108
	Negative	-,138
Kolmogorov-Smirnov Z		1,096
Asymp. Sig. (2-tailed)		,181

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Rasio B/TPD Sesudah Otonomi Daerah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		BTPD
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,8289
	Std. Deviation	,07769
Most Extreme Differences	Absolute	,114
	Positive	,085
	Negative	-,114
Kolmogorov-Smirnov Z		,908
Asymp. Sig. (2-tailed)		,382

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Rasio PAD/TPD Sebelum Otonomi Daerah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PADTPD
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,1406
	Std. Deviation	,08260
Most Extreme Differences	Absolute	,159
	Positive	,159
	Negative	-,136
Kolmogorov-Smirnov Z		1,259
Asymp. Sig. (2-tailed)		,084

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Rasio PAD/TPD Setelah Otonomi Daerah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PADTPD
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0963
	Std. Deviation	,04719
Most Extreme Differences	Absolute	,160
	Positive	,160
	Negative	-,069
Kolmogorov-Smirnov Z		1,273
Asymp. Sig. (2-tailed)		,078

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Rasio PAD/PR

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 SEBELUM	,2189	63	,14569	,01836
SESUDAH	,1279	63	,06945	,00875

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 SEBELUM & SESUDAH	63	,594	,000

Paired Samples Test

	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
				Paired Differences				
Pair 1 SEBELUM - SESUDAH	,0910	,11844	,01492	,0611	,1208	6,095	62	,000

Rasio B/TPD

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 SEBELUM	,8240	63	,10020	,01262
SESUDAH	,8289	63	,07769	,00979

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 SEBELUM & SESUDAH	63	,580	,000

Paired Samples Test

	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
				Paired Differences				
Pair 1 SEBELUM - SESUDAH	-,0049	,08393	,01057	-,0261	,0162	-,465	62	,643

T-Test rasio PAD/TPD

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 SEBELUM	,1406	63	,08260	,01041
SESUDAH	,0963	63	,04719	,00595

Paired Samples Correlations

Pair	N	Correlation	Sig.
1 SEBELUM & SESUDAH	63	,589	,000

Paired Samples Test

Pair	SEBELUM - SESUDAH	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
1		,0443	,06679	,00841	,0275	,0611	5,263	62	,000